**BAB II**

**DUKUNGAN MILITER RUSIA TERHADAP SURIAH**

1. **Profil Negara Rusia**
2. **Sejarah Rusia**

Sejarah Rusia diawali dengan perpindahan bangsa-bangsa Skandinavia yang dikenal sebagai bangsa Varangia yang dipimpin oleh tokoh semilegendaris Rurik yang menyeberangi Laut Baltik, serta pada tahun 862 M memasuki kota Novgorod dan memerintah di sana. Pada tahun 882 ia menguasai Kiev, kota Slavia yang berkembang menjadi pusat perdagangan antara Skandinavia dan Konstantinopel. Pada tahun 989 Vladimir I meluaskan wilayahnya hingga Kaukasus dan Laut Hitam serta mengambil ajaran Gereja Ortodoks Yunani. Kerajaan Kiev Rusia berakhir setelah serangan Mongol pada tahun 1237 oleh Batu Khan, cucu Genghis Khan.

Selanjutnya bangsa Mongol dikalahkan oleh Dimitri Donskoy pada tahun 1380 dengan kemenangan di Kulikovo. Kemudian daerah-daerah yang tercerai berai disatukan kembali oleh Ivan IV; ia menaklukan Kazan (1552), Astrakhan (1516) serta menguasai Siberia. Pemerintahan dilanjutkan oleh penerusnya sampai wangsa Romanov naik tahta yang diawali dengan diangkatnya oleh Michael Romanov sebagai Tsar (1613). Dinasti Romanov berkuasa selama 304 tahun hingga tahun 1917 dengan Tsar Nikolai II sebagai tsar terakhir. Pada bulan Februari 1917 dibentuk Pemerintahan Sementara di bawah Pangeran Lyvov dan Alexander Kerensky sampai 25 Oktober 1917, saat pemerintahan tersebut digantikan Pemerintahan Revolusi Bolshevik oleh Vladimir Ilyich Lenin.

Pada periode selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan secara diktator oleh Josef Stalin (1922) yang mewujudkan Uni Soviet (Soviet berarti Dewan) dengan bergabungnya negara-negara di sekitar Rusia. Pemerintahan Uni Soviet berakhir setelah pada tanggal 25 Desember 1991 Presiden Mikhail Gorbachev mengundurkan diri serta berkibarnya bendera tiga warna Rusia di Kremlin.[[1]](#footnote-1)

1. **Letak Geografis**

Wilayah Rusia berada pada benua Eropa, terutama Eropa Timur serta benua Asia di mana Pegunungan Ural menjadi batas antara kedua benua. Wilayah paling luas adalah Siberia yang umumnya beriklim tundra. Karena letaknya di belahan bumi yang paling utara, maka wilayah perairan Rusia umumnya tertutupi es dengan beberapa laut yang bebas es yakni Laut Barents, Laut Putih, Laut Kara, Laut Laptev dan Laut Siberia Timur yang merupakan bagian dari Arktik atau kutub utara, serta Laut Bering, Laut Okhotsk dan Laut Jepang yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik.

Rusia memiliki beberapa pulau, antara lain Novaya Zemlya, daratan Franz-Josef, kepulauan Siberia Baru, pulau Wrangel di Samudra Arktik, Kepulauan Kuril dan Sakhalin (yang masih dipersengketakan dengan Jepang). Rusia memiliki beberapa sungai, di antaranya Sungai Dnephr (berbatasan dengan Ukraina) dan Sungai Volga. Selain itu terdapat Laut Kaspia serta Laut Hitam yang berbatasan dengan Turki. Melalui Selat Bosphorus dan Selat Dardanela, kapal-kapal Rusia dari Laut Hitam dapat berlayar menuju Laut Tengah dan Terusan Suez. Adapun batas wilayah Rusia sebagai berikut :

* Sebelah Barat: Berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia, negara-negara Baltik yakni Estonia dan Latvia serta Belarus dan Ukraina
* Sebelah Selatan: Laut Hitam, Georgia dan Azerbaijan, Laut Kaspia, Kazakhstan.
* Sebelah Timur: Republik Rakyat Cina, Mongolia,Samudra Pasifik utara meliputi Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Selat Bering
* Sebelah Utara: berbatasan dengan Samudra Arktik (Kutub Utara)



1. **Sistem Pemerintahan**

Pemerintah Federasi Rusia didasarkan pada konstitusi yang telah disetujui oleh suara rakyat pada tahun 1993, menggantikan konstitusi 1978 yang telah berkali-kali diubah. Negara ini dibagi menjadi 49 oblast, atau divisi administratif.

Kepala negara Rusia adalah presiden. Presiden dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun. Perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Dewan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Konstitusi 1993 memperkuat kekuasaan presiden. Ia bisa mengangkat dan memberhentikan perdana menteri (dengan persetujuan parlemen), memiliki hak veto atas undang-undang, dan membubarkan parlemen.

Cabang legislatif terdiri atas parlemen yang disebut Majelis Federal, yang terdiri atas dua rumah, yakni Dewan Federasi dan Duma Negara. Dewan Federasi memiliki 178 deputi, masing-masing dua dari 89 republik, wilayah, dan divisi administratif lain dari Federasi Rusia. Duma Negara memiliki 450 anggota. Setengah dari mereka dipilih dari konstituensi anggota tunggal dan setengah menurut perwakilan proporsional oleh berbagai partai politik.

Sistem peradilan Rusia terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tinggi. Semua hakim diangkat seumur hidup oleh Dewan Federasi atas rekomendasi dari presiden.segera dinilai sebagai sukses besar baik oleh *demokrat Party* ( DP) maupun oposisi. [[2]](#footnote-2)

1. **Hubungan Diplomatik Rusia - Suriah**
2. **Sejarah**

Hubungan Rusia dan Suriah sebenarnya merupakan hubungan lama yang dijalin kembali, hubungan tersebut sudah ada bahkan pada saat Rusia masih berbentuk Uni Soviet dan Suriah masih belum menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia internasional dan PBB pada 17 April 1946.

Menurut sejarah, Rusia meletakkan Byzantyne Army di Suriah pada abad ke 10 dan 11, dan setelah perjanjian Carlovitz dengan Ottoman Empire pada 1699 semakin banyak para pendatang Rusia yang mengunjungi Suriah dalam perjalanan mereka ke Palestina dengan berbagai tujuan yang ada, termasuk didalamnya masyarakat Kristen Orthodox.[[3]](#footnote-3) Hal ini membuat Kekaisaran Orthodox memperluas pengaruhnya hingga membuat sebuah pos konsuler yang beroperasi di Aleppo, Latkia, Beirut, dan Saida pada 1893. Pengaruhnya terus meluas sampai ke Suriah, dimana mereka juga membangun sebanyak tujuh puluh empat sekolah untuk memajukan pendidikan di Suriah pada 1905.

Hal ini merupakan awal kedekatan hubungan Rusia dan Suriah yang nantinya akan terus berlanjut di kemudian hari. Seperti contoh, Suriah menjadi salah satu partner yang sangat kronis bagi Uni Soviet yang pada saat itu menjadi salah satu kunci kekuatan Uni Soviet dalam menjaga dominasinya di dunia internasional. Selain itu, Suriah juga menjadi aliansi Uni Soviet untuk mencapai kepentingannya di dunia Internasional, khususnya dalam peran sebagai pintu masuk yang digunakan Uni Soviet untuk masuk ke kawasan Timur Tengah.

 Berlanjut setelah berakhirnya perang dunia, yaitu pada saat pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Rusia kemudian menjadi negara yang bisa dibilang masih merepresentasikan Uni Soviet dibanding negara negara kecil pecahan Uni Soviet lainnya, Rusia mulai membenahi kondisi yang ada didalam negerinya untuk bisa kembali aktif dan mendominasi dalam politik internasional.

 Rusia kemudian merumuskan kembali semua bentuk kebijakan luar negerinya untuk kembali mencapai kejayaan masa lalunya. Hal itu tertuang di beberapa dokumen keamanannya yang tercermin dari kebijakan yang dikeluarkan Presiden Vladimir Putin yang ingin mengembalikan pengaruh Rusia dengan mengeluarkan National Security Concept pada tahun 2000. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Rusia telah kembali ke arena politik internasional dan berusaha untuk mengembalikan keayaan masa lalu yang dimilikinya.[[4]](#footnote-4)

 Rusia masih memandang Timur Tengah sebagai kawasan yang cukup strategis baginya dalam politik internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini yang kemudian membuat Rusia kembali membangun hubungannya yang dulu pernah terjalin begitu dekat khususnya dengan Suriah. Selain itu melalui hubungannya dengan Suriah itulah menjadi jalan bagi Rusia untuk mengambil keuntungan menjadi negara yang berpengaruh mengingat kawasan Timur Tengah merupakan kawasan shatterbelt. Shatterbelt merujuk terhadap kawasan geografis dengan dua kondisi yaitu, didalamnya benyak terjadi konflik lokal dengan atau antara negara-negara kawasan tersebut, dan terdapat keterlibatan beberapa aktor major power yang berasal dari luar kawasan tersebut.[[5]](#footnote-5) Menjadi alasan yang sama bagi Amerika untuk menaruh pengaruhnya di Timur Tengah. Hal ini juga yang menjadikan ambisi politik Rusia di Timur Tengah mengingat masih adanya rivalitas antara Rusia dan Amerika.

1. **Politik**

Rivalitas politik antara Rusia dan Amerika di Suriah bersamaan ketika terjadinya fenomena Arab Spring yang menjadi salah satu isu yang menarik perhatian di dunia internasional. Arab Spring merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pemberontakan yang terjadi di negara negara Arab di Timur Tengah seperti demonstrasi, protes, dan konflik bersenjata. Pemberontakan tersebut dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah lokal yang dinilai diktator, monarki-absolut, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada rakyatnya sendiri.[[6]](#footnote-6)

Pada saat Arab Spring, Suriah mengalami krisis yang terjadi antara gerakan oposisi melawan pemerintah yang dinilai sebagai aristokrasi modern dimana rakyat tidak lagi terpenuhi aspirasinya. Pemerintah Suriah dianggap sebagai diktator yang menindas rakyat dan membuat tidak diakuinya hak hak rakyat. Hal ini kemudian menimbulkan tindakan protes oleh opisisi untuk menurunkan pemerintahan mulai dari demonstrasi hingga cara cara militer. Proses penurunan rezim Bashar Al-Assad yang telah dimulai sejak awal 2000-an dinilai oleh rakyat Suriah telah menghasilkan korban ratusan nyawa baik dari sipil maupun dari pemerintahan itu sendiri.

Adanya konflik internal tersebut telah memancing intervensi dari banyak pihak termasuk pihak Barat dan juga oposisinya. Pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, berdasarkan sejarah dan kebijakan luar negerinya di Semenanjung Arab menginginkan Suriah yang demokratis dengan menggulingkan rezim Assad. Namun, lain dengan pihak oposisinya yaitu Rusia dan Cina yang juga memainkan politik yang sesuai dengan kepentingannya. Dimana jika rezim Assad mampu bertahan, maka hal tersebut akan menjadi kerugian bagi pihak Barat.

Rusia muncul dan menawarkan bantuan dalam mengatasi desakan dan campur tangan internasional dalam penyelesaian konflik internal di Suriah. Dengan begitu Rusia menolak segala bentuk sanksi yang dapat memberatkan Suriah seperti sanksi ekonomi dan politik. Disisi lain, China juga sepakat untuk membebaskan Suriah dari jalan intervensi militer Dewan Keamanan. Sebagai negara pemegang hak veto terhadap resolusi yang ditawarkan Dewan Keamanan PBB, Rusia dan China telah membuat pihak Barat yang dipimpin Amerika tidak bisa lagi melakukan tindakan militer dan harus mengganti strateginya dengan cara non-militer di Suriah.

Tindakan yang dilakukan Rusia untuk mendukung Suriah tidak lain adalah menggambarkan sebuah strategi politik Rusia untuk mengurangi pengaruh Amerika di Timur Tengah khususnya di Suriah. Hal ini dilakukan Rusia dalam rangka melindungi investasinya berupa hubungan ekonomi dan militer dengan Suriah .

Hak Veto Rusia dalam Forum DK PBB Pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Keamanan PBB kembali membuat resolusi untuk mengancam Pemerintah Suriah yang melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang menentang rezim Presiden Suriah Bashar al Assad. Resolusi ini hampir sama dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap pemerinahan Khadafi di Libya beberapa waktu lalu. Resolusi ini dirancang oleh Prancis bersama Inggris Jerman dan Portugal. Resolusi ini juga mendapat dukungan dari Sembilan anggota Dewan Keamanan yang lain. Namun, pada akhirnya resolusi ini gagal diloloskan karena dua negara yang memiliki hak veto, yakni China dan Rusia yang memberikan hak vetonya untuk menentang resolusi tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menekankan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai solusi untuk situasi di Suriah adalah dengan cara dialog. Lavrov menunjukkan bahwa kelompok - kelompok bersenjata yang telah membombardir unit-unit militer, rumah sakit – rumaj sakit dan gedung-gedung pemerintahan untuk menciptakan bencana manusia dan berdalih bahwa serangan ini ada campur tangan asing di dalamnya. [[7]](#footnote-7)

1. **Pendekatan dinamis Rusia terhadap Suriah**

Perspektif Rusia terhadap politik dan kancah internasional berdasarkan kinerja praktis dan berporos pada kepentingan. Oleh karena itu, Moskow di setiap periode selalu merevisi kinerja dan kebijakan internasionalnya berdasarkan kepentingannya. Rusia dalam dua dekade terakhir dalam format politik konvergensi dengan Barat, berusaha menjalin hubungan baru melalui Eropa dan Amerika Serikat. Sedemikian rupa sehingga Uni Eropa menjadi mitra terbesar perdagangannya.

 Namun dalam dua tahun terakhir, kebijakan tersebut mengalami perubahan fundamental. Pada hakikatnya, sebelum krisis Ukraina, dunia menyaksikan pertumbuhan pesat hubungan Rusia dan Barat khususnya dengan Uni Eropa. Akan tetapi krisis yang terjadi di Ukraina, mempengaruhi hubungan kedua pihak dan mengubah total kondisi. Hubungan kerjasama dan kemitraan tersebut berubah menjadi konfrontasi dan permusuhan.

Sekarang, Rusia dalam koridor perubahan total kebijakannya, sesuai dengan politik perspektif ke Timur, bukan hanya dari sisi keuangan dan ekonomi, industri, energi, militer, dan persenjataan ke Asia Timur khususnya Cina dan India, melainkan juga berusaha menjalin hubungan dekat dengan Timur Tengah dan Amerika Latin. Kebijakan tersebut sekaligus menjawab klaim Barat bahwa Rusia tidak mempedulikan kepentingannya di Timur Tengah dan bahkan meninggalkan sekutunya di kawasan itu. Dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan gerakan penting dari Rusia menjalin hubungan lebih dekat dengan tiga negara Timur Tengah yaitu Suriah, Iran dan Irak.

Tentang Timur Tengah, masalah-masalah seperti kinerja pemerintah Presiden AS Barack Obama untuk mereduksi peran langsung AS dalam krisis di kawasan serta ketidakpuasan negara-negara konservatif Arab terhadap AS soal kesepakatan nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), di samping kebijakan Rusia saat ini di Timur Tengah, telah tercipta berbagai peluang baru bagi Moskow.

Faktor-faktor tersebut mengaktifkan divisi Timur Tengah dalam politik Rusia, yang menjadi masalah penting untuk banyak negara dan pemain regional, termasuk di antara masalah Suriah. Sekarang Rusia berusaha untuk berpartisipasi pro-aktif di Timur Tengah berdasarkan kepentingannya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia memberikan perhatian khusus kepada Suriah dan bahkan menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan penting antara kelompok oposisi dan pemerintah Suriah. Mikhail Bogdanov, Wakil Menlu Rusia pada 17 Agustus 2015 dalam pidatonya menyatakan bahwa negaranya sedang mempersiapkan tahap awal pelaksanaan Konferensi Moskow III untuk menyelesaikan krisis Suriah.

Dijelaskannya bahwa hasil perundingan dengan kelompok oposisi Suriah di Moskow dan Kairo harus menjadi landasan perundingan mereka dengan pemerintah Damaskus. Saat ini Moskow sedang berunding dengan pemerintah Suriah dan oposisi agar bersedia menghadiri konferensi perundingan ketiga tersebut. Selain tiu, Moskow juga berupaya meningkatkan kontak antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi.

Rusia menyambut baik deklarasi program perdamaian Suriah di Dewan Keamanan yang dikemukakan oleh De Mistura. Para diplomat Barat khawatir bahwa deklarasi tersebut akan gagal oleh veto Rusia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa gerakan terbaru para diplomat Rusia untuk menyelesaikan krisis Suriah memperjelas kesepahaman penuh antara Moskow dan Tehran serta berlanjutnya perselisihan antara Washington dan Riyadh. Dalam hal ini, Sergei Lavrov menegaskan kebijakan Rusia tidak berubah, bahwa rakyat Suriah sendiri yang berhak menentukan masa depan mereka tanpa campur tangan dan prasyarat dari pihak asing. Seluruh keputusan tentang langkah-langkah transisi dan reformasi di Suriah harus diselesaikan antara pemerintah dan kelompok oposisi.

Amerika Serikat juga menyadari bahwa dalam sejumlah masalah regional khususnya krisis Suriah dan juga masalah pemberantasan ISIS, tidak akan dapat terwujud tanpa musyawarah, bantuan dan partisipasi Rusia. Sementara Rusia merupakan penentang alot politik Washington terkait krisis Suriah khususnya tentang mekanisme pemberantasan ISIS. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menuding Barat sebagai penyebab krisis dan perang di Suriah, dalam rangka menggapai tujuan ilegal mereka di Suriah. Amerika Serikat dan sekutunya juga berperan penting dalam pembentukan dan perluasan kelompok-kelompok teroris di Irak dan Suriah.

Pada Februari 2015, Putin menilai langkah sepihak militer AS dan Barat di Timur Tengah menjadi jalan pembuka aktivitas kelompok teroris Takfiri ISIS di Suriah dan Irak. Putin juga menyebut langkah-langkah koalisi anti-ISIS pimpinan AS tidak efektif. Langkah-langkah yang diambil oleh anggota koalisi anti-ISIS serta strategi dan taktik mereka tidak sesuai dengan dimensi dan esensi ancaman yang ada.

Salah satu dimensi penting krisis Suriah untuk Rusia adalah masalah kehadiran kelompok-kelompok takfiri di Suriah dan Irak dan keberadaan ribuan orang warga Rusia dan Asia Tengah di dalam kelomppok tersebut. Pada hakikatnya sekarang masalah kembalinya para ekstrimis ke negara asal mereka dan ancaman aksi teror oleh mereka menjadi ancaman besar bagi para pejabat politik dan keamanan Rusia. Tercatat sekitar 2.000 warga Rusia hingga kini telah bepergiaan ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teroris Takfiri.

Mengingat seriusnya ancaman kembalinya para anasir Takfiri ke Rusia dan berbagai negara Asia Tengah dan Kaukasus, sekarang Rusia berniat terjun langsung untuk mendaratkan pukulan telak kepada teroris di Suriah. Sebagaimana yang dilaporkan oleh koran Yediot Aharonot, terbitan Israel, yang mengklaim bahwa Rusia telah memulai intervensi militer langsung di Suriah untuk memberantas ISIS, sepengetahuan Amerika Serikat. Dalam hal ini, sebuah satuan armada udara Rusia telah ditempatkan di sebuah pangkalan udara Suriah. Di lain pihak, Amerika Serikat hanya bungkam di hadapan langkah Rusia itu. Gedung Putih menyatakan sedang dengan teliti membahas laporan tentang operasi militer Rusia di Suriah.

Beberapa tahun terakhir, Rusia berkomitmen memberikan bantuan luas terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Dalam hal ini, Putin menjelaskan kebijakan terbaru Rusia dan menekankan bahwa pengiriman perlengkapan militer ke Suriah pada dasarnya adalah implementasi kontrak militer pada 5-7 tahun lalu.

Langkah terbaru Rusia menyerahkan jet-jet tempur MiG-31 dan roket anti-baja Kornet kepada Suriah adalah dalam rangka upaya yang sama. Dengan hal ini, Rusia menyampaikan pesan dukungan politik dan militer terhadap Damaskus. Mengingat sebelumnya sejumlah negara mengklaim bahwa sikap Rusia terhadap Suriah telah berubah setelah mempertimbangkan kepentingannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Para pengamat menilai pengiriman jet-jet tempur mutakhir MiG-31 dan roket Kornet mengandung pesan sangat penting bagi sejumlah pihak regional dan internasional. Meski ini bukan pertama kalinya Rusia memberikan bantuan militer kepada sekutunya, akan tetapi langkah Rusia dengan mempertimbangkan situasi di kawasan saat ini, merupakan pesan kuat bagi Barat dan sekutunya di kawasan bahwa Moskow tidak akan menghentikan dukungan terhadap sekutunya. Tidak hanya itu, pengiriman jet-jet tempur tersebut selain mendongkrak kemampuan tempur Suriah di udara juga sebagai peringatan kepada musuh-musuhnya di kawasan.

Suriah sangat penting bagi Rusia dari beberapa sisi. Apalagi setelah dalam beberapa tahun terakhir Rusia menyaksikan keluarnya sekutu-sekutunya di Timur Tengah dari lingkup pengaruh Moskow, dan Barat telah menggeser posisi Rusia. Dan tampaknya Rusia tidak ingin kecolongan lagi di Suriah. [[8]](#footnote-8)

1. **Kepentingan Nasional Rusia**

Berdasarkan pada kejatuhan yang dialami oleh Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia merumuskan kembali semua bentuk kebijakan luar negerinya. Keinginan Rusia tersebut untuk kembali mencapai kejayaan masa lalunya dan hal itu tertuang di beberapa dokumen keamanannya. Hal ini tercermin dari kebijakan yang dikeluarkan Presiden Vladimir Putin yang ingin mengembalikan pengaruh Rusia dengan mengeluarkan National Security Concept pada tahun 2000. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Rusia telah kembali ke arena politik internasional dan berusaha untuk mengembalikan kejayaan masa lalu yang dimilikinya.[[9]](#footnote-9) Rusia memandang Timur Tengah merupakan kawasan yang krusial baginya untuk mencapai kepentingan nasional. Hal ini membuat Rusia untuk kembali merefleksikan hubungannya yang sempat terputus pada masa pemerintahan sebelumnya. Di kawasan tersebut Rusia bisa memulai kembali ambisinya untuk menjadi negara yang berpengaruh mengingat kawasan Timur Tengah merupakan kawasan shatterbelt. Shatterbelt merujuk terhadap kawasan geografis dengan dua kondisi yaitu, didalamnya benyak terjadi konflik lokal dengan atau antara negara-negara kawasan tersebut, dan terdapat keterlibatan beberapa aktor major power yang berasal dari luar kawasan tersebut.[[10]](#footnote-10)

Timur Tengah juga merupakan kawasan yang sangat bernilai bagi negara negara berpengaruh seperti Amerika Serikat dan Rusia. Hal ini diperburuk dengan terjadinya fenomena Arab Spring yang menjadi salah satu isu yang menarik perhatian di dunia internasional. Arab Spring merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bentuk pemberontakan yang terjadi di negara negara Arab di Timur Tengah seperti demonstrasi, protes, dan konflik bersenjata. Pemberontakan tersebut dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah lokal yang dinilai diktator, monarki-absolut, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada rakyatnya sendiri.[[11]](#footnote-11)

Di sisi lain, saat ini Suriah sedang mengalami krisis yang dimotori gerakan oposisi melawan pemerintah yang dinilai sebagai aristokrasi modern dimana rakyat tidak lagi terpenuhi aspirasinya. Pemerintah Suriah dinilai sebagai bagian dari rezim diktator yang menindas rakyat dan malah membuat rakyatnya menderita. Sehingga, hal ini menimbulkan tindakan protes untuk menurunkan pemerintahan dalam bentuk demonstrasi turun ke jalan, litrasi media, dan cara-cara militer, ditempuh oleh oposisi untuk mencapai keinginan mereka. Proses penurunan rezim Bashar Al-Assad yang telah dimulai sejak tahun 2011 dinilai oleh rakyat Suriah telah menghasilkan korban ratusan nyawa baik dari sipil maupun dari pemerintahan itu sendiri. Apalagi timbulnya isu baru-baru ini yang mengklaim penggunaan senjata kimia berbahaya yang digunakan pihak pemerintah Suriah untuk melawan pihak oposisi yang mengakibatkan korban di pihak sipil yang tidak bersalah dan memakan korban banyak orang. Konflik internal tersebut telah memancing intervensi dari banyak pihak termasuk pihak Barat dan juga oposisinya.

 Pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, berdasarkan sejarah dan kebijakan luar negerinya di Semenanjung Arab menginginkan Suriah yang demokratis dengan menggulingkan rezim Assad. Namun, lain dengan pihak oposisinya yaitu Rusia dan Cina yang juga memainkan politik yang sesuai dengan kepentingannya. Dimana jika rezim Assad mampu bertahan, maka hal tersebut akan menjadi kerugian bagi pihak Barat. Dengan banyaknya campur tangan yang terjadi, maka kompleksitas krisis di Suriah saat ini merupakan hasil dari konversi banyak kepentingan.

 Rusia muncul dan secara nyata menawarkan bantuan untuk menghadapi desakan dancampur tangan internasional dalam penyelesaian krisis domestik di Suriah. Sehingga, dengan tegas Rusia menolak segala bentuk sanksi yang dapat memberatkan Suriah dalam hal ini termasuk sanksi ekonomi dan politik. Dewan Keamanan PBB menyepakati untuk mengaplikasikan Chapter 7 Article 41 UN Charter maka jalan intervensi militer akan terbuka bagi Suriah.[[12]](#footnote-12)

. Namun, bersama dengan Rusia, China juga sepakat untuk membebaskan Suriah dari jalan intervensi militer Dewan Keamanan. Sehingga, sebanyak tiga kali veto dijatuhkan untuk Suriah.Dengan ditolaknya Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Krisis Suriah, maka hal itu berarti AS tidak dapat melakukan tindakan militer dan harus mengganti strateginya dengan cara non-militer di Suriah. Maka, AS mulai memberikan bantuan dana terhadap oposisi sebagai bentuk dukungannya untuk menjatuhkan rezim Assad.

Rusia menilai keterlibatannya di Suriah merupakan upaya untuk melindungi investasinya,dikarenakan hubungan ekonomi dan militer antara Rusia dan Suriah telah berlangsung sejak terjadinya Perang Dingin sampai dengan saat ini. Salah satu bukti nyatanya yaitu pendirian kamp militer Rusia di Suriah di Pelabuhan tartus pada tahun1963 mencerminkan eratnya hubungan kedua negara ini. Sedangkan dilihat dari kerjasama militer, pada tahun 2011, kontrak mliter Rusia dan Suriah mencapai angka USD 4 mliyar dan diperkirakan angka ini akan bertambahseiring dengan perkembangan krisis yang semakin meruncing.

1. **Konfrontasi Rusia**

Washington Post menulis ada empat alasan mengapa Rusia ingin melindungi Assad. Pertama, Rusia memiliki pangkalan di Suriah yang cukup strategis. Pangkalan ini merupakan markas militer terakhir Rusia di luar negara-negara Uni Soviet. Kedua, Rusia masih memiliki jiwa mental perang dingin. Dia ingin tetap mempertahankan aliansi militer terakhirnya. Ketiga, Rusia membenci ide intervensi Barat seperti yang dilakukan terhadap Suriah. Keempat, Suriah telah membeli perlengkapan militer cukup besar dari Rusia. Sejak abad 20, Rusia mungkin telah menjual lebih dari 1,5 miliar dolar AS senjata ke Suriah. Belakangan, Rusia dikabarkan telah menjual pesawat tempur MiG-29 dan s-300 ke Suriah.

Pihak Barat sering menuduh Rusia bahwa mereka menentang intervensi militer di Suriah untuk melindungi kepentingan ekonomi negara sendiri. Vasily Kuznetsov, dosen jurusan Politik Dunia di Moscow State University, meragukan bahwa kepentingan militer dan ekonomi yang menentukan kebijakan Rusia di Timur Tengah.

Merupakan hal yang salah untuk mengatakan bahwa Moskow melindungi kontrak di Suriah. Betul, memang ada kontrak dalam bidang militer dan sipil, tetapi kontrak baru juga dapat dibuat dengan pemerintah baru nanti. Contohnya Irak, di mana perusahaan-perusahaan Rusia bergerak aktif untuk mengembalikan posisi mereka. Pangkalan di Tartus hanyalah dua pelabuhan yang tidak sebanding dengan usaha yang sedang dilakukan oleh Moskow untuk Suriah. Lagipula, tidak ada skuadron Rusia di Laut Tengah pada saat ini.

Situasi yang mengelilingi Suriah perlu dilihat dari sudut geopolitik yang lebih luas. Sejak tahun 2003, Rusia menyaksikan AS dan sekutunya ikut campur dalam urusan Timur Tengah, mengatur serangan militer, mengorganisir atau memicu revolusi. Moskow mengerti jelas bahwa pihak Barat tidak memikirkan konsekuensinya dan tidak menyadari bahaya kebijakan tersebut. Di Irak, Afghanistan ataupun Libya, tidak ada demokrasi, tetapi korban dan ketidakstabilan yang mereka buat tak terhitung banyaknya.

Setelah invasi AS ke Irak, terjadi perang saudara antara Sunni dan Syiah . Di Libya, setelah penggulingan Muammar Gaddafi juga tidak ada stabilitas nyata. Negara ini telah menjadi kumpulan suku dengan milisi mereka sendiri dan tidak dianggap sebagai negara penting karena pemerintah pusatnya yang lemah.

1. **Kedaulatan nasional**

Menurut Vasily Kuznetsov, Rusia tidak melindungi Presiden Bashar al-Assad. Ide kedaulatan nasional inilah yang melindungi filosofi mapan hubungan internasional. Rusia juga berusaha untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah, karena jika tidak, akan membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Hal ini, terutama menyangkut penyebaran Islam radikal di daerah selatan Rusia.

Dalam krisis Suriah ada aspek lain yang tidak memungkinkan Rusia untuk tetap diam saja. Di Suriah, terdapat sekitar 30 ribu warga Rusia (menurut beberapa sumber sampai 100 ribu). Mereka adalah wanita Rusia yang menjadi istri orang Suriah dan anak-anak dari perkawinan campuran. Jika pihak oposisi menang maka semua orang itu akan terancam bahaya.

1. Sepengetahuanku “Sejarah Singkat Negara Rusia” diakses dari <http://sepengatahuanku.blogspot.co.id/2013/06/sejarah-singkat-negara-rusia.html> pada tanggal 28 maret 2016 pukul 18:06 [↑](#footnote-ref-1)
2. “Profil Lengkap Negara Rusia” diakses dari <http://www.kembangpete.com/2014/08/25/profil-lengkap-negara-rusia/> pada tanggal 28 maret 2016 pukul 18:36 [↑](#footnote-ref-2)
3. Andrej Kreutz, “Russia in the Middle East: Friend or Foe ?” (Praeger Security International) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ministry of Foreign Affairs Russian Federation, *National Security Concept of The Russian Federation Approved by Presidential Decree No. 24 of 10 january 2000*, Ministry of Foreign Affairs Russian Federation Official Site [↑](#footnote-ref-4)
5. Paul R. Hensel&Paul F.Diehl, 1994, *Testing Empirical Propositions Abput Shattebelts* [↑](#footnote-ref-5)
6. Alexander Cockburn, 2011, The Tweets And Revolutions, Counter Punch Diaries, edisi 18-20 Februari 2011 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nunun, “Rusia Tetap Tolak Sanksi Terhadap Suriah” diakses dari

http://www.suarakaryaonline.com pada tanggal [↑](#footnote-ref-7)
8. “Pendekatan dinamis Rusia terhadap Suriah” diakses dari <http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/100629-pendekatan-dinamis-rusia-terhadap-suriah> pada tanggal [↑](#footnote-ref-8)
9. Ministry of Foreign Affairs Russian Federation,

*National Security Concept of The Russian Federation Approved by Presidential Decree No. 24 of 10 january 2000*, Ministry of Foreign Affairs Russian Federation Official Site [↑](#footnote-ref-9)
10. Paul R. Hensel&Paul F.Diehl, 1994, *Testing Empirical Propositions Abput Shattebelts* [↑](#footnote-ref-10)
11. Alexander Cockburn, 2011,*The Tweets And Revolutions* Counter, Punch Diaries, edisi 18-20 Februari 2011Paul R. Hensel&Paul F.Diehl, 1994, *Testing Empirical Propositions Abput Shattebelts* [↑](#footnote-ref-11)
12. United Nations Security Council, 2011,*Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria’s Crackdown on* *Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China*, United Nations Official Site, 4 Oktober 2011, NewYork [↑](#footnote-ref-12)